



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (Sepuluh)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	:	Kamis, 2 Desember 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Penyampaian Rencana <i>Initial Public Offering</i> (IPO) dan <i>Right Issue</i> BUMN di Tahun 2021-2022; 2. Lain lain.
Hadir	:	1. 48 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Menteri BUMN, Bapak Erick Tohir; b. Wakil Menteri BUMN I, Bapak Pahala Nugraha Mansury; c. Wakil Menteri BUMN II, Bapak Kartika Wirjoatmodjo; d. Staf Khusus BUMN, Bapak Aria Sinulingga. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri BUMN pada pukul 10.39 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dengan Menteri BUMN pada hari Kamis, 2 Desember 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN dalam melaksanakan IPO dan *Right Issue* memperhatikan *timing* dan kondisi yang tepat termasuk mempertimbangkan BUMN mempunyai prospek yang baik.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN memaparkan rencana dan strategi yang jelas terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dalam pelaksanaan IPO atau *Right Issue* sebaiknya diperhitungkan dengan baik sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari public maupun investor serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar - besarnya bagi perusahaan.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai enam BUMN yang sudah *go public* namun belum memiliki kinerja optimal. Terkait dengan itu Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.
5. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian BUMN untuk pelepasan BUMN dan Anak Perusahaan dengan penghasilan dibawah 50 Miliar Rupiah kepada Pengusaha Nasional.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memaparkan dan menjelaskan rencana dan mekanisme pelepasan BUMN dan Anak Perusahaan yang penghasilannya dibawah 50 Miliar Rupiah dengan lebih detail.
7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperbaiki pola komunikasi dalam konteks pengelolaan BUMN, terutama setiap rencana korporasi yang menjadi perhatian public secara jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.
8. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.59 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103